

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Komoditi menjadi kekuatan sebuah negara dalam mendapatkan keuntungan yang besar sehingga negara melakukan banyak kerjasama untuk semakin memperluas pasar komoditinya. Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka dimana lalu lintas perekonomian internasional sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi mensyaratkan bahwa kesejahteraan penduduk harus meningkat, dan salah satu ukuran dari peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya pertumbuhan ekonomi.

Selain kelapa sawit, komoditi yang menjadi kekuatan Indonesia adalah karet. Indonesia merupakan salah satu negara produsen karet alam terbesar di dunia disamping Malaysia dan Thailand. Karet merupakan komoditas ekspor yang mampu mengharumkan nama Indonesia di pentas perdagangan internasional. Keunggulan Indonesia dalam peningkatan produksi karet untuk masa yang akan datang adalah pada masih tersedianya lahan tropis cukup besar yang sesuai untuk penanaman pohon karet.

Karet yang menjadi bahan dasar banyak peralatan rumah tangga maupun peralatan industri dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Permintaan tersebut meliputi karet alam yang berbahan dasar getah pohon karet (*lateks*) dan karet sintetis yang berasal dari minyak

mentah. Kemudian, karet yang berasal dari lateks terbagi menjadi karet asap atau *Ribbed Smoked Sheet* dan *Crumb Rubber* (karet remah) yang digolongkan sebagai karet spesifikasi teknis (TSR = *Technical Specified Rubber*).

Karet memiliki peranan penting bagi Indonesia, diantaranya sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja, sebagai sumber devisa negara dari ekspor non-migas, juga mendorong tumbuhnya agro-industri dibidang perkebunan, dan sumber daya hayati dan pelestarian lingkungan. Meskipun tanaman ini baru diperkenalkan pada tahun 1864 Indonesia memiliki perkebunan karet dengan luas 3.2 juta hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat (Schaar, 2018). Adapun perkebunan karet di Indonesia adalah 85% merupakan milik rakyat, 7% milik negara, serta 8% perkebunan besar milik swasta. Produksi karet Indonesia baik produksi perkebunan swasta, perkebunan pemerintah maupun perkebunan rakyat terus mengalami peningkatan. produksi karet Indonesia setiap tahunnya tumbuh rata-rata sebesar 5,26 persen dengan rata-rata produksi mencapai 1.787.102 ton pertahun. Peningkatan produksi karet Indonesia setiap tahunnya menempatkan Indonesia sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand. (Schaar, 2018)

Semakin tingginya prospek industri karet setiap tahun, menyebabkan banyaknya perkebunan komoditi seperti kakao, kopi, dan teh yang diubah menjadi lahan berkebun karet. Peralihan ini memperluas area perkebunan karet Indonesia menjadi 3.65 juta hektar di tahun 2015. Sebanyak 85% dari hasil produksi karet Indonesia di ekspor ke luar negeri dikarenakan sedikitnya penggunaan karet domestic. Meskipun mulai ada peningkatan penggunaan dalam

negeri seperti untuk alas kaki, sarung tangan karet, benang karet, dan ban. Nilai ekspor komoditi karet yang banyak memberi masukan devisa negara membuat komoditi ini penting bagi Indonesia (Schaar, 2018). Namun, dengan pencapaian seperti yang disebutkan di atas, jika dibandingkan dengan potensi luas lahan perkebunan karet yang dimiliki Indonesia dengan negara – negara pesaing industri karet lainnya yang tidak memiliki lahan sebesar itu, hasil produksi karet Indonesia terbilang masih jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Hasil produksi karet Indonesia perhektar hanya 1.080 kg/ha, sedangkan Thailand menjadi yang tertinggi mampu menghasilkan 1.800 kg/ha. Bahkan Vietnam 1.720 kg/ha dan Malaysia 1.510 kg/ha. (Schaar, 2018)

Thailand, Malaysia, dan Indonesia sebagai tiga negara penghasil komoditi karet terbesar di dunia dapat menutupi lebih dari 70% dari kebutuhan karet dunia. Mayoritas penghasil karet di Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang adalah petani karet kecil atau *smallholders* mengharuskan ketiga negara ini memikirkan lebih jauh lagi strategi agar nilai penjualan karet tidak menurun. Kerjasama komoditi yang pada dasarnya untuk memperkuat hubungan antar produsen dengan produsen, atau produsen dan konsumen ini menjadi sangat berguna jika bersama sama membudidayakan, memasarkan, dan memberi atau menerima bantuan teknis, yang semua ini dilakukan demi meningkatkan taraf hidup petani.

Pada 12 Desember 2001, Menteri Industri Dasar Malaysia, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand menandatangani *Joint Ministerial Declaration* dan dengan itu *International Tripartite Rubber Council* dijalankan dengan tujuan untuk menstabilkan harga karet dipasaran agar *smallholders* mampu mendapatkan hasil yang lebih baik. Gapkindo (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia) ditunjuk sebagai

National Tripartite Rubber Corporation (NTRC) yang akan mengeksekusi segala kebijakan ITRC di Indonesia pada tanggal 31 Januari 2002, melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/MPP/Kep/I/2002, dimana penugasan ini diharapkan memberi hasil yang baik bagi meningkatkan kemakmuran petani karet.

Kemudian pada 8 Agustus 2002, ketiga negara kembali bertemu di Bali guna menandatangani *Memorandum of Understanding* guna membentuk *International Rubber Consortium* (IRCo). IRCo didirikan untuk menentukan dan melaksanakan penggunaan langkah – langkah strategis, yaitu langkah jangka pendek *Strategic Market Operation* (SMO) dan *Agreed Export Tonnage Scheme* (AETS) atau skema alokasi ekspor juga langkah jangka panjang *Supply Management Scheme* (SMS) atau skema pengurangan produksi. (Prabowo, 2006)

Kerjasama dalam kerangka *International Tripartite Rubber Council*(ITRC) dilaksanakan melalui IRCo. Lebih sederhananya, IRCo merupakan perusahaan gabungan yang didirikan berdasarkan MoU yang disepakati ketiga negara. Didirikannya IRCo bukan untuk mengejar keuntungan, tapi lebih dari sebuah badan yang melakukan strategi operasi pasar. Modal atau biaya yang dikeluarkan untuk IRCo, yang tertera di MoU, bukan sebuah bentuk investasi, melainkan biaya untuk mencapai tujuan yang disebutkan sebelumnya. Fungsi – fungsi IRCo antara lain adalah untuk melakukan monitor harian mengenai ekonomi dan pasar karet dunia, melakukan penghitungan harian *Daily Composite Price* atau pergerakan harga rata – rata dalam 14 hari (2 minggu), dan juga mengingatkan anggota pada setiap perkembangan yang signifikan pada perubahan harga karet dipasaran.

Pada pertengahan 2003, pelaksanaan SMS dan AETS ditunda menyusul kenaikan harga karet alam di pasar dunia menyusul terjadinya perang Irak-Amerika Serikat yang menyebabkan naiknya harga minyak bumi sebagai bahan baku utama karet sintetis. Peningkatan harga juga dipicu oleh habisnya stok karet Amerika Serikat yang disimpan untuk 50 tahun pada Oktober 2002 sehingga perdagangan dibiarkan berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. (Prabowo, 2006)

Kemudian, pada 29 Oktober 2008, harga karet alam dunia mulai turun karena krisis global seperti yang diutarakan oleh Menteri Perdagangan Maria Elka Pangestu pada keterangan persnya di Jakarta, sehingga ITRC dan IRCO melakukan pertemuan guna melaksanakan program-program kesepakatan seperti AETS, SMS, dan SMO dalam menghadapi penurunan harga karet alam. (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008)

Oktober 2012, Februari 2015, dan Desember 2015 juga anggota-anggota ITRC melakukan pertemuan guna melaksanakan kesepakatan penahanan jumlah ekspor agar harga karet yang sedang menurun di pasaran akan membaik dikarenakan beberapa faktor diantaranya bertambahnya negara-negara produsen karet, seperti Vietnam, Laos, Kamboja sehingga kuantitas karet berlebihan dan apabila suplay berlebih dipasaran sedangkan demand relatif sedikit otomatis harga karet menurun. Kemudian faktor lainnya ialah akibat krisis AS dan Eropa.

Melakukan perdagangan internasional menjadi salah satu jalan meningkatkan devisa negara. Karet sebagai salah satu komoditi terbesar Indonesia, menjadi penting untuk memiliki strategi pemasarannya sendiri. International Tripartite Rubber Council yang beranggotakan Thailand, Malaysia, dan Indonesia terbentuk dengan tujuan menstabilkan harga

karet dipasarkan sehingga smallholders ditiap negara mendapat penghasilan yang sesuai atau setidaknya dapat menutupi biaya produksi. Untuk mendapatkan hasil tersebut, ITRC menerapkan beberapa macam strategi pemasaran agar harga karet yang stabil dapat meningkatkan ekspor karet diketiga negara ini. Akan tetapi, justru pada tahun 2012-2017 harga karet tidak stabil.

Tabel 1.1. Berikut tabel harga karet dari 2012-2017.

Tahun	US\$/Kg
2012	3,21
2013	2,55
2014	1,95
2015	1,43
2016	1,73
2017	1,46

Sumber : Diolah dari Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia, *Statistik*

Perkebunan Indonesia Tree Crop Estate Statistic of Indonesia 2012-2017, hal. 5. *Statistik harga karet gapkindo 2016-2017*.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengapa *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) tidak mampu menjaga stabilitas harga karet pada tahun 2012-2017?

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Pembahasan mengenai daya saing suatu unit produksi, baik untuk tingkat perusahaan, sektor, maupun ekonomi (negara), sudah seumur perdagangan internasional. Dalam teori keunggulan absolut (Adam Smith, 1776) dijelaskan bahwa suatu negara dapat menikmati kemakmurannya apabila dapat menjadi spesialis atau menjadi efisien dalam memproduksi barang dan menjualnya ke negara lain. Efisiensi sistem produksi suatu negara karena tersedianya sumber yang secara absolut lebih murah dari negara lain. Kemudian Adam Smith juga menyatakan bahwa perdagangan internasional akan terjadi apabila masing-masing negara yang akan melakukan perdagangan memiliki keunggulan absolut yang berbeda dan keduanya mendapatkan keuntungan.

Dalam perspektif liberal, mengandaikan bahwa kehadiran lembaga atau organisasi internasional merupakan simbol dari hubungan antar negara yang saling tergantung. Semakin meningkatnya interdependensi memaksa negara – negara untuk melakukan kebijakan – kebijakan yang rasional yang lebih mengarah pada kerjasama. Dari cara pandang semacam ini, kelahiran dari berbagai organisasi atau lembaga di tataran internasional dapat dilihat sebagai bagian dari kebutuhan untuk melakukan institusionalisasi kerjasama yang akan mengarah pada penciptaan rezim.

Konsep mengenai rezim mulai muncul pada tahun 1970an, namun pelajar ilmu hubungan internasional telah tertarik dan mempelajari aturan dan tingkah laku negara sejak jauh sebelum itu (Richard Little, 2009). Studi mengenai rezim internasional merupakan upaya

memahami kondisi – kondisi seperti apa yang membuat negara bekerjasama. Kerjasama eksklusif antarnegara yang bergeser menjadi institusi formal dalam bentuk organisasi internasional menyebabkan sering terjadi kerancuan antara rezim dan organisasi internasional, walau pada kenyataannya rezim dan organisasi internasional adalah dua hal yang berjalan beriringan dan terkadang tumpah tindih. (Citra Hennida, 2015)

Rezim internasional membentuk organisasi internasional melalui perjanjian antar negara. Oleh karena itu para pembuat perjanjian yang kemudian membentuk organisasi disebut sebagai "*contracting parties*" (Ahlborn 2011). (Citra Hennida, 2015). Dengan memperhatikan bagaimana kedua pendekatan ini melihat aktor yang berperan merupakan kunci utama dalam membedakan pendekatan rezim dan pendekatan institusi internasional. Institusionalis akan melihat bahwa organisasi internasional adalah aktornya dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut, sedangkan analisis rezim akan melihat bahwa negara sebagai aktor dan sumber dari kebijakan dalam politik internasional, dan mempertanyakan apa efek dari prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang terasosiasi dengan organisasi internasional sesuai dengan keinginan dan tingkah laku negara (Barkin, 2006)

Dalam rezim, terdapat tiga pendekatan. Yang pertama diwakili oleh tulisan - tulisan dari Oran Young, Raymond Hopkins dan Donald Puchala yang melihat rezim sebagai karakter pervasive dari sistem internasional. Artinya bahwa tidak ada perilaku tertentu yang dapat bertahan dalam sistem internasional tanpa dukungan rezim di dalamnya. Pendekatan yang kedua dimana konsep yang membawa pada arah yang keliru, yang hanya fokus pada hubungan antara

ekonomi dan power yang mengacu pada tulisan – tulisan Susan Strange. Strage menolak adanya peran signifikan dari rezim untuk mengubah perilaku. Rezim akan signifikan ketika mengatur permasalahan – permasalahan ekonomi. Pendekatan ketiga mengacu pada tulisan – tulisan dari Arthur Stein, Robert Keohane, Robert Jarvis, John Ruggie, Charles Lipson, dan Benjamin Cohen. Pendekan ketiga dalam rezim ini mengarah pada pendekatan strukturalis yang menekankan bahwa system internasional berfungsi secara sistematis dimana Negara dengan power yang besar menguasai lingkungan yang anarkis. (Citra Hennida, 2015)

Cara lebih mudah untuk mengetahui sebuah rezim menurut Donald Puchala dan Raymond Hopkins adalah, sebuah rezim eksis di setiap area substantif dalam hubungan internasional, dimana terdapat aturan mengenai bagaimana bertingkah laku, norma – norma, dan prinsip yang diakui bersama. (Simmons, 1987)

Krasner (1982) memberikan definisi bahwa rezim internasional merupakan serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan dimana ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional. (Citra Hennida, 2015) Sedangkan menurut Robert O. Keohane rezim-rezim internasional merupakan contoh perilaku kerja sama dan merupakan upaya untuk memfasilitasi kerja sama, tetapi yang perlu digaris bawahi adalah rezim internasional belum tentu sama dengan kerja sama karena bisa saja sebuah kerja sama tidak didasari dari rezim-rezim. (Citra Hennida, 2015) Sumber hukum internasional yang sah pada pelaksanaannya ditandai dengan adanya perjanjian antar negara yang terlibat.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi ketidakefektifan sebuah rezim internasional diantaranya efektivitas rezim dalam penyelesaian masalah tergantung pada tiga aspek yaitu, *output* (keputusan), *outcome* (perilaku) dan *impact*(dampak). Orientasi *output* dilakukan satu langkah lebih dekat ke tujuan sosial ditangani oleh rezim dalam studi untuk meneliti kepatuhan hukum dengan komitmen internasional dan dengan demikian menyoroti juga kegiatan legislatif dan program nasional dalam menanggapi rezim internasional (Stokke, 1999: 7). Kemudian *outcome* yang berkaitan dengan perilaku aktor atau negara yang terlibat dalam suatu rezim dari segi penerapan aturan rezim guna menghadapi isu tertentu. *Impact* menggambarkan tingkat keberhasilan sebuah rezim dalam mewujudkan tujuannya karena rezim internasional berperan untuk mewujudkan tujuan negara. Pemeriksaan keputusan rezim, pelaksanaan hukum domestik dan dampak pada perilaku aktor yang relevan adalah blok bangunan penting dari pendekatan permasalahan demi terwujudnya efektivitas rezim (Stokke, 1999: 9).

Dalam mengetahui efektif tidaknya sebuah rezim juga dapat dikaji dari segi mekanismenya yang ditinjau dari tiga kategori yaitu *utilitarian*, *normative* dan *cognitional*. Pertama *utilitarian* maksudnya rezim dapat memengaruhi perilaku sehingga dapat memecahkan masalah dengan mengubah utilitas aktor dengan menetapkan opsi perilaku sesuai dengan isu area misalnya dengan memberikan insentif aturan kepatuhan dan sanksi bagi yang tidak patuh (Stokke, 1999: 10). Kedua, *normative* maksudnya rezim dapat memengaruhi perilaku sesuai dengan isu area yaitu dengan membuat norma-norma dalam rezim. Norma dapat melegitimasi kepatuhan dan larangan bagi aktor yang terlibat dalam sebuah rezim berjalannya proses dan prinsip yang berlaku. Ketiga, *cognitional* yaitu dengan

mempengaruhi kesadaran aktor tentang masalah tertentu sehingga aktor tersebut terpengaruh perihal pengetahuan tentang cara-cara sehingga masalah atau isu dapat dikurangi (Stokke, 1999: 11). (Bonnie Setiawan, 2003)

Sedangkan efektivitas sebuah rezim menurut teori Underdahl terdapat beberapa variabel-variabel yakni variabel dependen, variabel independen, serta variabel intervening (Underdal, 2001: 13). Di dalam variabel dependen ini dibagi menjadi tiga kategori yakni *output*, *outcome*, serta *impact*. *Output* adalah seperangkat aturan, program, serta pengorganisasian yang ditetapkan untuk operasionalisasi dari rezim. Hal ini dilakukan agar perencanaan tentang kesepakatan tertentu bisa terwujud (Underdal, 2002: 4-15) Biasanya *output* ini tertulis seperti traktat, delarasi dan lain sebagainya, ataupun tidak tertulis yang biasanya terdapat pada norma, prinsip, dan lain sebagainya. Sedangkan *Outcome* ini menunjukkan sebuah perubahan perilaku dari aktor-aktor yang dikenai keputusan dan ketentuan tertentu dalam rezim. Kemudian yang terakhir adalah *impact* yang berkaitan dengan besar tidaknya kemungkinan rezim tersebut berhasil. Dari ketiga variabel di dalam variabel dependen ini kemudian penulis memahami bahwa berawal dari *output* yang merupakan aturan yang dikeluarkan oleh sebuah rezim, kemudian dapat dilihat bagaimana efektivitas dari rezim tersebut dengan melihat bagaimanakah perilaku aktor-aktor yang menjadi anggota rezim tersebut. Apakah terpengaruh atau tidak serta patuh atau tidak. Rezim dapat dikatakan berhasil apabila anggotanya patuh dan perilakunya berubah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh rezim.

Kemudian, variabel yang kedua, yaitu variabel independen. Jika pada variabel dependen, penulis melihat efektivitasnya lewat perilaku dari anggota, maka di variabel independen ini penulis dapat mengatakan bahwa efektivitas dari sebuah rezim terlihat pada bagaimana rezim tersebut

mengatasi permasalahan. Bila merujuk pada artikel Underdal (2002: 18), rezim yang dapat dikatakan berhasil adalah rezim yang bersifat *benign* dibandingkan *malign* karena bila rezim tersebut bersifat *benign*, rezim akan mudah untuk mencapai kesepakatan. Di dalam variabel independen ini, terdapat kategori masalah *malignancy*, *problem solving capacity*, serta *intervening problem*. Dalam kategori *problem malignancy*, permasalahan akan muncul ketika isu atau konflik yang diangkat dalam sebuah rezim tersebut memiliki potensi yang besar untuk membuat negara menjadi enggan bekerjasama. Permasalahan *malignancy* ini memiliki tiga kategori yang di antara lain adalah *Incongruity* atau ketidaksepahaman karena tidak semua anggota rezim menganggap isu sebagai konflik atau permasalahan, *asymmetry* atau kepentingan yang berbeda antara anggota satu dengan anggota lain yang menyebabkan timbulnya perpecahan, serta *cumulative cleavages* atau perbedaan yang terakumulasi yang besar kemungkinannya untuk menimbulkan perpecahan. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan *problem solving capacity* yang merupakan permasalahan yang terkait dengan fungsi-fungsi dari unsur-unsur seperti *setting* kelembagaan, distribusi kekuasaan, serta keahlian dan energy yang tersedia untuk rezim tersebut dapat bekerja (Underdal, 2002: 18-22).

Keefektifan sebuah rezim juga dapat dilihat berdasarkan variabel interveningnya, yang mana dalam variabel ini efektif tidaknya sebuah rezim dilihat berdasarkan tingkat kolaborasinya (Underdal, 2002: 7). Terdapat enam skala yang dapat menjadi ukuran level kolaborasi; yakni gagasan bersama, koordinasi tindakan secara rahasia, rumusan aturan secara eksplisit, penilaian secara terpusat, implementasi pada tingkat nasional, koordinasi tindakan secara terencana, serta integrasi antara perencanaan dan implementasi (Underdal, 2002: 7-8). (Hurrel, 2006)

D. Hipotesa

Dengan melihat pokok permasalahan dan kerangka pemikiran yang ada diatas, maka penulis memberikan jawaban atas pokok permasalahan (Hipothesa) yaitu :

1. Kebijakan International Tripartie Rubber Council (ITRC) tidak efektif dalam meningkatkan dan menstabilkan harga karet di pasar internasional khususnya di Indonesia.
2. International Tripartite Rubber Council belum optimal dalam mengkoordinir para anggotanya dalam mengimplementasikan peraturan yang sudah disepakati.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yakni:

Untuk mengetahui bagaimana peran *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) terhadap industri karet Indonesia.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi praksis maupun referensi akademis, antara lain:

1. Sebagai bahan rujukan bagi pemerintah Indonesia dan lembaga terkait dalam pengembangan industri karet.
2. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu hubungan internasional.

F. Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode ini dilakukan dengan memberi gambaran mengenai peran *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) terhadap daya saing industri karet Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah telaah pustaka (*library research*). Dengan mencari segala dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal, buku, *website*, dan lainnya. Kemudian data – data yang diperoleh dari berbagai literatur akan menjadi bahan untuk membantu menganalisa penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dengan teknik data kualitatif yang analisisnya akan diarahkan pada data non-matematis. Namun, tidak menutup kemungkinan jika akan ada angka – angka yang ditunjukkan untuk memperjelas penelitian ini.

I. Metode Penulisan

Metode penulisan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Penulisan akan dimulai dengan menggambarkan permasalahan secara umum. Kemudian berdasarkan data-data yang telah diperoleh kemudian dihasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Batasan dan Jangkauan Penelitian

Penulis akan memberikan batasan spasial dan temporal, maka penulis mencoba memberikan batasan pada penyusunan skripsi ini. Penulis hanya akan membahas peran *International Tripartite Rubber Council (ITRC)* terhadap daya saing industri karet Indonesia pada tahun 20012 sampai 2017.

K. Sistematika Penulisan

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. |
| Bab II | Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang obyek penelitian yang akan diteliti. yaitu kondisi obyektif <i>Industri karet di Indonesia</i> . |
| Bab III | Dalam bab ini penulis akan membahas tentang <i>International Tripartite Rubber Council (ITRC)</i> . |

Bab IV Dalam bab ini penulis membahas mengapa *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) gagal menjaga stabilitas harga karet pada kurun waktu 2012-2017.

Bab V Kesimpulan dan analisis dari bab-bab sebelumnya.